

KONSEP "SMART CITY " DALAM MENCAPAI PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN DI DAERAH BALI

I Made Agus Mahendra¹

¹Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta
Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115

Abstrak – Tingginya antusias dan perkembangan pariwisata di Indonesia, khususnya Bali, semakin menarik perhatian publik. Kementerian Pariwisata melaporkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Januari hingga Desember 2016 mencapai 4 juta. Tahun 2017 ini diharapkan meningkat 25 persen atau 5 juta orang. Budaya Bali terkenal dengan keunikannya dan dikenal sampai level internasional, Keunikan yang dimiliki Bali dari sumber daya alam, adat, budaya, sistem sosial kemasyarakatan sampai pada bentangan struktur topografi dan demografi berperan dalam mengangkat kualitas pariwisata Bali. Sehingga pariwisata berkelanjutan atau ajeg Bali bisa terwujud. Kemajemukan permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah Bali saat ini membutuhkan sebuah konsep percepatan pembangunan terdapat ekonomi pintar (smart economy), mobilitas pintar (smart mobility), lingkungan pintar (smart environment), masyarakat pintar (smart people), kehidupan cerdas (smart living) dan pemerintahan pintar (smart governance). Keenam unsur ini merupakan integrasi dari smart city Development smart city juga dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Adapun pengembangan smart city dalam hal pariwisata adalah menitikberatkan dalam hal ekonomi dan promosi. Diharapkan dengan adanya smart city maka suatu kota dapat mencapai sebuah pariwisata yang berkelanjutan yang bersinergi dengan segala aspek penataan kota di suatu daerah, sehingga smart city ini diolah sedemikian rupa agar dapat mengembangkan dan keberlanjutan sebuah daerah pariwisata.

Kata kunci: Smart City, smart tourism, sustainable tourism Development, Pariwisata bali

Abstract – High enthusiasm and development of tourism in Indonesia, especially Bali, increasingly attracting the attention of the public. Ministry of tourism reported that the visit of foreign tourists in the January to December 2016 reached 4 million. The year 2017 is expected to increase 25 percent or 5 million people. Balinese culture is famous for its uniqueness and is known to the international level, the uniqueness of Bali from natural resources, customs, culture, civic social system to the structure of the stretch of the topography and demography play a role in lifting Bali's tourism quality so that sustainable tourism can be realized. the complex development problems facing the area of Bali today requires an acceleration of the development of concepts there is smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living and smart governance. The sixth element is the integration of the smart city Development. smart city also designed to paint for the Government and the community in getting information.. As for the development of a smart city in terms of tourism is emphasized in terms of Economics and promotion. It is hoped the presence of smart city then a city can achieve a sustainable tourism that synergize with all aspects of the arrangement of the city in an area, so that the smart city is processed in such a way so that it can develop and sustainability a regional tourism

Keywords: Smart City, smart tourism , sustainable tourism Development, tourism in Bali

PENDAHULUAN

Smart city dapat diartikan sebagai "kota cerdas". Smart city adalah sebuah konsep yang dirancang guna membantu berbagai hal kegiatan masyarakat. Dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat, baik informasi mengenai kebijakan pemerintah maupun informasi

berita lainnya. (Purnomowati & Ismini 2014). Smart City merupakan bahasa inggris yang mempunyai arti "Kota Cerdas". Hal ini dapat diartikan sebagai sebuah kosep yang dirancang untuk membantu pemerintahan, dan masyarakat, terutama dalam penelolan pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengelolaan sumber daya manusianya sendiri. Selain itu smart city juga dirancang

untuk memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Misalnya bagi masyarakat dapat mengetahui kebijakan pemerintah, bagi pemerintah dapat mengetahui keinginan masyarakat (Purnomowati & Ismini 2014).

Sebuah kota dikatakan Smart apabila kota tersebut benar-benar dapat mengetahui keadaan kota di dalamnya baik masyarakatnya maupun pemerintahannya serta segala isi kota tersebut. Memahami permasalahan tersebut secara lebih mendalam, hingga mampu melakukan aksi terhadap permasalahan tersebut baik berupa solusi, maupun berupa teknikal. Dalam buku Pengenalan dan Pengembangan *Smart City*, dijelaskan kota cerdas adalah sebuah konsep pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengolah berbagai sumber yang ada di dalam kota baik dari segi pemerintahan maupun dari segi masyarakat dan sumber daya alam kota dengan lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat. Adapun pengembangan *smart city* dalam hal pariwisata adalah menitikberatkan dalam hal ekonomi dan promosi. Diharapkan dengan adanya *smart city* maka suatu kota dapat mencapai sebuah pariwisata yang berkelanjutan yang bersinergi dengan segala aspek penataan kota di suatu daerah. Disisi lain dapat menyebarkan informasi mengenai wilayah suatu daerah baik ke lokal maupun ke dunia internasional. Sebagai akibat dari perkembangan kunjungan wisatawan, berbagai sarana penunjang pariwisata mulai didirikan seperti restoran, artshop, pasar seni, pusat hiburan, dan tempat rekreasi mulai tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek wisata. Sehingga para wisatawan memiliki berbagai pilihan dalam menikmati liburan mereka di Bali. Hunian wisata merupakan salah satu sarana akomodasi dalam sektor pariwisata dan sarana akomodasi tersebut merupakan industri yang menggerakkan pariwisata di Bali. Industri pariwisata adalah salah satu faktor penting yang memegang peranan dalam memajukan pariwisata di Bali.

Ada anggapan bahwa pariwisata Bali telah berada pada titik stagnasi dapat kita lihat dari indikator tingkat kunjungan wisatawan asing ke Bali yang cenderung menunjukkan angka yang stagnan bahkan

beberapa tahun sebelumnya sempat menurun. Para praktisi pariwisata dan juga pemerintah daerah rupanya juga telah mengetahuinya. Namun sayang, kebijakan yang diambil masih terlihat bersifat sementara dan kurang menyeluruh untuk pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Ketika pariwisata kota dan daerah tersebut sudah dikenal maka hal ini dapat mendatangkan keuntungan terhadap kota dan daerah tersebut. Dimana ketika pariwisata suatu daerah berkembang maka tentu ekonomi pun semakin membaik, sehingga *smart city* ini diolah sedemikian rupa agar dapat mengembangkan dan keberlanjutan sebuah daerah pariwisata. (Purnomowati & Ismini 2014).

Pesatnya pertumbuhan dan pembangunan untuk kepentingan perumahan dan industri pariwisata, hotel, villa, bungalow, dan sarana kegiatan olah raga air di hampir semua kawasan pesisir di Bali telah mengakibatkan tekanan-tekanan terhadap kehidupan sosial-budaya masyarakat, sumber daya alam (air, udara, dan tanah), dan ekosistem yang ada di sekitarnya (Anonim, 2008).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa pengertian dari *smart city* itu sendiri. Pertama, *smart city* adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah setempat. *Smart city* juga dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup baik dalam hal finansial, akademik, politik, serta memberikan keberlanjutan pariwisata yang berkesinambungan

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana konsep *smart city* dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan di daerah Bali ?
- Bagaimana pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah Bali ?

TUJUAN

- Memberikan Konsep pemikiran *Smart city* dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan di daerah Bali bagi pemerintah daerah khususnya
- Memberikan pemikiran untuk konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah Bali

PEMBAHASAN

Konsep Smart City di Daerah Bali

Dari arah pembangunan jangka panjang Daerah Bali sudah nampak bahwa

pemerintah daerah telah mempersiapkan SDM dan Iptek untuk mewujudkan daerah Bali yang “*smart city*” (kota pintar) berkelanjutan disemua aspek. Konsep *smart city* (Kota pintar) diidentifikasi pada enam sumbu utama atau dimensi yaitu :

a. ekonomi pintar (inovasi dan persaingan)

Titik berat pembangunan sumber daya manusia dan IPTEK di daerah Bali diwujudkan melalui peningkatan konektivitas antar kabupaten, pemerataan, dan mutu layanan sosial dasar, peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja masyarakat daerah bali menuju persaingan secara global; pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk, peningkatan partisipasi masyarakat daerah Bali di segala bidang. Program pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi perlu digalakkan untuk mendorong inovasi dan mengantisipasi persaingan usaha. Melonjaknya jumlah pelaku usaha belakangan ini tentunya mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Bahkan sekarang ini persaingan antara pengusaha yang satu dengan pelaku usaha lainnya sudah dalam kondisi yang semakin kompleks

b. Mobilitas pintar (transportasi dan infrastruktur)

rencana pembangunan infrastruktur daerah bali diwujudkan melalui konektivitas antar 9 kabupaten/kota yang ada dengan penguatan sistem perencanaan infrastruktur daerah, pengembangan titik titik wisata sebagai simpul penguatan konektivitas pariwisata, peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; penataan perumahan dan akomodasi wisata ; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur. Dengan ketersediaan dan konektivitas sarana/prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan keberlanjutan pariwisata yang ada serta kualitas hidup masyarakat dan sekaligus dapat mengundang lebih banyak investor masuk di daerah kawasan pariwisata Bali, sehingga akan mendorong pengembangan pariwisata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan infrastruktur kota/kabupaten yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem

pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik.

c. Masyarakat pintar (kreativitas dan modal sosial)

Pembangunan sebuah kota/kabupaten senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi (*economic capital*), modal manusia (*human capital*) maupun modal sosial (*social capital*). Kemudahan dalam modal dan pelatihan bagi UMKM dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan dan kepercayaan diri mereka dalam mengembangkan usahanya. Modal sosial termasuk elemen-elemennya seperti kepercayaan, gotong royong, toleransi, penghargaan, saling memberi dan saling menerima serta kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui berbagai mekanisme seperti meningkatnya rasa tanggungjawab terhadap kepentingan publik, meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kejahatan. Tata nilai ini perlu dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat daerah Bali.

d. Lingkungan pintar (keberlanjutan dan sumber daya)

degradasi fungsi kawasan yang berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan di daerah Bali pada dasarnya adalah akibat kelalaian atau kesengajaan oleh masyarakat dan pemerintah, seperti kawasan yang seharusnya menjadi daerah resapan atau penampung air hujan dijadikan kawasan akomodasi pariwisata bentuk pemanfaatan lain yang secara nyata menghalangi dan mengurangi daya resap tanah terhadap air hujan, dampak langsungnya akan terjadi banjir apabila terjadi hujan.

Daerah Bali dalam beberapa hal terkait dengan pembangunan berwawasan lingkungan masih menyisakan persoalan. Persoalan tersebut antara lain semakin tumbuh suburnya pembangunan villa-villa dikawasan daerah wisata yang terkesan tanpa perencanaan dan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah, pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang memanfaatkan ruang terbuka hijau (RTH). Konsekwensi di masa mendatang konsep pembangunan daerah Bali harus dikembalikan pada konsep budaya bali melalui konsep tri hita karena yaitu

parhyangan, pawongan dan palemahan dimana hubungan yang harmonis manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Pendekatan hubungan manusia dengan alam sekitar (Palemahan) sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mempersyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau (baik privat maupun publik). Memberikan ruang terbuka hijau lebih banyak dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya.

e.Cerdas hidup (kualitas hidup dan kebudayaan)

Berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki kualitas hidup yang terukur (budaya). Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Pencapaian budaya pada manusia, secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan. Maka kualitas pendidikan yang baik adalah jaminan atas kualitas budaya, dan atau budaya yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas.

Sebagai kota pendidikan, banyak kebijakan maupun program yang telah diambil pemerintah Kota Bali guna meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan arah pembangunan jangka panjang di bidang penguatan SDM dan Iptek yaitu Terwujudnya Kota Bali sebagai Kota Pendidikan yang berorientasi global dengan kearifan lokal, Terwujudnya SDM yang Berkualitas dengan Penguasaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berbudaya, dan Terwujudnya lingkungan kota yang kondusif sebagai kota pendidikan yang berkualitas.

f.Pemerintahan yang cerdas (pemberdayaan dan partisipasi).

Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *Good Governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip “desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing”. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota sehingga pelaksanaan penguatan asas desentralisasi memerlukan perangkat peraturan perundangan yang mendukung. Upaya mengikutsertakan masyarakat (*stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan hanya dapat terwujud bila kehidupan demokrasi berjalan dengan baik. Proses demokratisasi akan berjalan dengan baik jika tercipta supremasi hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Bali telah bersemangat untuk menuju ke arah *Good Governance*.

Isu permasalahan sentral bagi pembangunan Kota di Bali, yaitu tingginya konsentrasi pembangunan Pusat-pusat pariwisata di kabupaten/kota (Badung, Gianyar, Denpasar). Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah Kabupaten perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah Bali, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan sebuah sistem pariwisata (*sustainable tourism Development*). Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarkabupaten/kota dan pemerataan pembangunan fisik di setiap daerah, tetapi yang paling utama adalah pengurangan kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antar kabupaten/kota daerah Bali. Keberpihakan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar pembangunan. Hal yang dapat dilakukan adalah membangun wilayah-wilayah tertinggal melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan konektivitas antara wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah pusat kota serta mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Konsep Smart City dalam Mencapai Pariwisata yang berkelanjutan di Daerah Bali

Kepariwisata di daerah Bali merupakan sektor kegiatan yang sangat strategis, terbukti banyak negara yang menempatkan penyelenggaraan pariwisata sebagai sektor perdagangan jasa andalan dalam

perolehan devisa dan penggerak perekonomian masyarakat. Hal ini sangat beralasan sebab sektor pariwisata sebagai industri jasa yang tidak memiliki keterbatasan (*borderless*) seperti:

1. Tidak dapat dibatasi dengan wilayah
2. Tidak ada pembatasan quota produk
3. Tidak ada keterbatasan bahan baku/tidak habis dikonsumsi
4. Tidak termasuk dalam kategori industri padat modal

Menurut Bater et. al. (2001) dalam Anonim (2006), pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: partisipasi, keikutsertaan para pelaku (*stakeholder*), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor, dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan, serta promosi.

1. Partisipasi

Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan para pelaku (*stakeholder involvement*)

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan wisata.

3. Kepemilikan lokal

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dan sebagainya seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterlibatan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatan harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya dukung

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alam, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan

serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara regular sehingga dapat ditentukan penyesuaian perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas pariwisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limit of acceptable use*).

7. Monitor dan evaluasi

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional, dan lokal.

8. Akuntabilitas

Perencanaan pariwisata harus memberikan perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti: tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan professional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

10. Promosi

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat *karakter landscape, sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-

kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

Menurut WTO dalam Sari (2006) menyebutkan bahwa keberlanjutan pariwisata harus memperhatikan 3 hal pokok (*triple bottom line principles*), yaitu:

- 1) keberlanjutan lingkungan/ekologis (*ecological sustainability*)
- 2) keberlanjutan sosial budaya (*sosial and culture sustainability*)
- 3) keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) bukan saja untuk generasi yang sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang.

Selain itu The World Commission on Environment and Development (WCED), 1987 memberikan batasan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak boleh melakukan penghancuran terhadap berbagai sumber daya, sehingga kesejahteraan generasi-generasi yang akan datang tetap terjamin.

Dalam Anonim (2008), untuk itu ada hal-hal penting untuk dijadikan rujukan pengembangan sektor wisata di masa depan, yaitu antara lain:

1. Harus ada tekad bersama untuk membenahi obyek-obyek wisata dari stakeholder yang berkepentingan dalam dunia pariwisata,
2. Perlu adanya tekad bersama untuk mewujudkan pandangan bahwa pariwisata dapat mensejahterakan masyarakat lokal,
3. Infrastruktur menuju obyek-obyek wisata dibangun dan dirawat untuk kemudahan aksesibilitas pariwisata.

Dengan kondisi Bali yang dilihat dari segi pariwisata tidak mengalami pemerataan kesejahteraan yang terbukti di daerah kabupaten Badung, Denpasar, dan Gianyar yang memiliki sarana akomodasi yang cukup banyak sehingga meningkatkan pendapatan daerahnya padahal kita ketahui

bersama obyek-obyek wisata banyak terdapat di daerah selain ketiga daerah tersebut. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan pariwisata hendaknya dilakukan penataan tata ruang yang matang sehingga mampu pemeratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah yang ada di Bali terutama pendapatan yang dihasilkan dari sektor pariwisata (Minca, 2000).

Maka oleh karena itu perlu adanya pemetaan-pemetaan atau mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di Bali menjadi wilayah yang cukup matang dan kuat nilai-nilai eksotik yang ditawarkan tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang dimiliki. Untuk daerah wisata yang sudah terlanjur bercampur dengan budaya luar yang telah beradaptasi disana maka dipetakanlah ruang-ruang tersebut sebagai daya tarik tersendiri.

Oleh karena itu, dalam upaya menjadikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan, Daerah Bali terus melakukan berbagai strategi pengembangan industri pariwisata melalui pengembangan kawasan wisata belanja atau souvenir, seperti pusat perbelanjaan, baik yang bersifat tradisional maupun modern yang tersebar di berbagai penjuru Daerah Bali. Untuk membangun Daerah wisata yang nyaman bagi wisatawan, maka perlu penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, jalan bebas banjir dan macet, parkir nyaman, peningkatan kualitas pelayanan dari semua stakeholder pariwisata, ketersediaan produk lokal sebagai oleh-oleh khas Bali, lingkungan yang bersih dengan udara segar, dan tersedia pusat informasi wisata. Semua kebutuhan ini bisa terpenuhi jika Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Kota Bali sebagai daerah tujuan wisata. Penanganan pariwisata seharusnya tidak dibebankan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata semata, namun juga menjadi tanggungjawab multi SKPD, seperti :

- Dinas Pekerjaan Umum : penyediaan sarana infrastruktur yang memadai
- Badan Lingkungan hidup : pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) 30%
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan : kebersihan dan keindahan kota
- Dinas Informasi dan Komunikasi : penyediaan internet, intranet dan sarana infrastruktur telematika

untuk memudahkan akses informasi bagi wisatawan

- Dinas Koperasi dan UKM : pemberdayaan UKM
- Dinas perindustrian dan Perdagangan : masalah perijinan usaha
- Dinas Perhubungan : perparkiran, terminal dan angkutan kota yang nyaman
- Dinas pasar : kebersihan dan kenyamanan pasar sebagai salah satu tujuan wisata belanja, penataan dan pembinaan PKL.
- Dinas Pendidikan : penyedia wisata pendidikan, termasuk juga menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi

Faktor Keberhasilan Pengembangan konsep Smart city dalam mencapai pariwisata yang berkelanjutan

Teknologi dan Infrastruktur

Teknologi merupakan factor utama keberhasilan dari smart city, terutama dalam pengembangan pariwisata. Hal ini disebabkan ketergantungan smart city terhadap cloud computing, hardware, software, dan jaringan teknologi sistem it yang real time (Community et al. 2015). Ketika teknologi-teknologi tersebut sudah ada, maka pengembangan pariwisata berbasis smart city dapat dicapai, kebalikannya apabila tidak terpenuhi otomatis pengembangan pariwisata akan jauh dari kata sempurna (Purnomowati & Ismini 2014).

Pemerintah dan Kebijakannya

Pemerintah juga termasuk factor utama dalam berhasilnya penerapan dari smart city. Hal ini dibuktikan dengan adanya partisipasi pemerintah dalam pengembangan kotanya, seperti dukungan kebijakan pemerintah terhadap agen – agen pengembang smart city, pemberian izin terhadap operasional alat. Jika pemerintahan mensupport adanya smart city, maka secara otomatis pengembangan pariwisata berdasarkan smart city dapat dicapai.

Masyarakat

Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga mengambil andil yang besar dalam pengembangan pariwisata berdasarkan konsep smart city, masyarakat harus bisa menggunakan teknologi, masyarakat juga harus mampu menjaga teknologi tersebut, sehingga nantinya dapat menjadi satu-kesatuan yang utuh antara pemerintah

dengan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

KESIMPULAN

Dari arah pembangunan jangka panjang Daerah Bali nampak bahwa pemerintah daerah telah mempersiapkan SDM dan Iptek untuk mewujudkan daerah Bali sebagai *smart city* (kota pintar). Sementara program-program yang bisa dilakukan untuk mewujudkan Bali *smart city* antara lain adalah pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM dan koperasi, penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemenuhan RTH 30% dan lain-lain Untuk membangun kota wisata yang nyaman bagi wisatawan, maka perlu penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, jalan bebas banjir dan macet, parkir nyaman, peningkatan kualitas pelayanan dari semua stakeholder pariwisata, ketersediaan produk lokal sebagai oleh-oleh khas Bali, lingkungan yang bersih dengan udara segar, dan tersedia pusat informasi wisata. Semua kebutuhan ini bisa terpenuhi jika konsep *smart city* diimplementasikan dengan baik dan jika Pemerintah daerah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan daerah Bali sebagai daerah tujuan wisata. Maka oleh karena itu perlu adanya pemetaan-pemetaan atau mengelompokkan wilayah-wilayah yang ada di Bali menjadi wilayah yang cukup matang dan kuat nilai-nilai eksotik yang ditawarkan tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya yang dimiliki. Untuk daerah wisata yang sudah terlanjur bercampur dengan budaya luar yang telah beradaptasi disana maka dipetakanlah ruang-ruang tersebut sebagai daya tarik tersendiri sebagai keberlanjutan pariwisata kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, Ramdisa. *Pariwisata = Masa Depan?* <http://www.p2par.itb.ac.id>.
- Anonim, 2006. *Pariwisata berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. <http://www.p2par.itb.ac.id>.
- Anonim. 2008. *Bali dan Pariwisata*. <http://www.baliprov.go.id>.
- Anonim. 2008. *Gemerlap Pariwisata di Bali Ancam Ekologi*. <http://www.balebengong.net/2008/01/21/di-balik-gemerlapnya-pariwisata-di-bali>.
- Belakang, A.L., Ilmu Lingkungan - Ekologi Smart City Oleh : Putu Nopa Gunawan / D411 10 009 Jurusan Teknik Elektro – Universitas Hasanuddin 1, Makassar.
- Community, S., Smart, F. & Indonesia, C., 2015. Smart city id. , I, pp.2–7.
- Cahiya. 2013. Empat Kota Pintar di Dunia. Diunggah di <http://cahiya.com/empat-kota-pintar-di-dunia-bagian-1/> tanggal 14 Februari 2013
- Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya.
- Paskaleva, K (25 January 2009). "Enabling the smart city: The progress of e-city governance in Europe". International Journal of Innovation and Regional Development.
- Pitana, I G. 2005. *Renvention of Bali: Menata Bali Pasca Tragedi Menuju Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan*. Analisis Pariwisata Volume 6.
- Purnomowati, W. & Ismini, 2014. Konsep Smart City Dan Pengembangan Pariwisata. Jurnal JIBEKA, 8(1), pp.65–71.
- Rukendi, Cecep. 2006. *Menemukan Kembali Konsep Pariwisata Budaya Indonesia*. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Volume I.
- Sari, Ika Kusuma Permana. 2006. *Pengembangan Desa Wisata dalam Konteks Pariwisata Berbasis Kerakyatan*. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Volume I No. 2.
- Tjatera, I Wayan. 2005. *A Model for Balancing Economic, Enviromental anf Sosio-Cultural Goals to Achieve Sustainable Tourism Development in Bali, Indonesia*. Jurnal Kepariwisataan Indonesia, Volume I.
- Utama, IGB Rai. 2008. Stagnasi Pariwisata Bali. <http://www.kpubali.wordpress.com>.